

**DATA INVENTARISASI PERATURAN DAERAH**  
**TAHUN 2003 s.d 2025**

NO.	NAMA PERATURAN	PENG-UND ANGAN	STATUS	HASIL PENELUSURAN	REKOMENDASI	SKPD	PELAKSANAAN	KETERANGAN
<b>Tahun 2003</b>								
1	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Daerah	17 Desember 2003	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2017	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	23 Juli 2003	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2003 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	11 April 2003	Berlaku	PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2003 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	11 April 2003	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2009	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
<b>Tahun 2004</b>								
1	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	20 Desember 2004	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI

	Daerah Tahun Anggaran 2004							
2	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004	09 Juli 2004	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2003	08 Juli 2004	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2004 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008	07 Juli 2004	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2004 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008	07 Juli 2004	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2004 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008	07 Juli 2004	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2004 Tentang Penetapan Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara	07 Juli 2004	Berlaku	PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	-

8	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2012	07 Juli 2004	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	-	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	Berlaku			Dinas Pendapatan Daerah		
10	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 8 Thn 2022	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2004 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2007	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial	-	SELESAI
12	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2004 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 7 Thn 2007	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial	-	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian	-	SELESAI

	Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008			Sekretariat Daerah		
14	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
15	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2006	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
17	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2004 Tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	Berlaku	PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 8 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	SELESAI

Tahun 2005								
1	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005	28 Desember 2005	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2005 Tentang Izin Pengelolaan Logam Tua	22 Desember 2005	Berlaku	-	Agar dilakukan Evluasi terhadap PERDA ini	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	-	BELUM SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara	22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja	22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat	-	SELESAI

	Kecamatan Di Kabupaten Penajam Paser Utara		dengan Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008			Daerah		
7	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2005 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara	22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2020	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	-	SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2005 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga di Kabupaten Penajam Paser Utara	22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 21 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial	-	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005	19 Agustus 2005	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Penajam Paser Utara	22 Juli 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 7 Thn 2017	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara	22 Juli 2005	Berlaku	PERDA ini masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI

				Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai dasar masih belum ada perubahan.				
<b>Tahun 2006</b>								
1	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006	29 Juni 2006	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Pelabuhan Khusus	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 2 Thn 2013	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Angkutan Umum Di Jalan	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2011	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 2 Thn 2013	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI

			Daerah No. 9 Thn 2012					
6	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 14 Thn 2011	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2006 Tentang Retribusi Terminal	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 15 Thn 2011	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2006 Tentang Pajak Reklame	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 20 Thn 2011	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI

11	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2006 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 5 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
12	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
<b>Tahun 2007</b>								
1	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2007 Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan	14 Desember 2007	Berlaku	a) PERDA ini telah mengatur sekitar 20 Pasal yang memerintahkan pemberntukan PERBUP sebagai pedoman pelaksanaan. b) Telah terbit PERDA No. 10 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. c) Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	a) Menyarankan untuk melakukan evaluasi Materi PERDA apakah ada yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, b) Menyarankan membentuk PERBUP yang mengatur Pedoman teknis PERDA.	Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja	-	BELUM SELESAI

				sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.				
2	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	13 Desember 2007	Berlaku	<p>Setelah terbitnya Peraturan-perundangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</li> <li>b) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan</li> </ul>	Mengevaluasi PERDA No. 14 Thn 2007 ttg Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	BELUM SELESAI

Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

c) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d) PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020.

e) PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; seyogyanya dilakukan evaluasi terhadap PERDA No. 14 Thn 2007 ttg Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi

				di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan melakukan strukturisasi ulang mana yang diatur di PERDA, agar tidak telalu berpengaruh apabila ada Peraturan yang lebih tinggi terbit, dan materi mana dapat didelegasikan pada PERBUP sebagai pedoman teknis pelaksanaan.				
5	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2007 Tentang Perubahan Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Menjadi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan	14 Desember 2007	Berlaku	a) Dalam PERDA memuat Perangkat Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah dalam mengelola urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan sementara yang ada saat bidang	Melakukan evaluasi terhadap PERDA No. 11 Thn 2007 ttg Izin Pemanfaatan Kayu Pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan, tekit keberlakukan, muatan materi yang diatur atau penyempurnaan agar	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	BELUM SELESAI

				perkebunan diurus oleh Perangkat Daerah Dinas Pertanian. b) Dalam PERBUP No. 52 Thn 2024 ttg Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak ada mengatur tentang izin Pemanfaatan Kayu, sehingga Pemerintah Daerah harus mencermati regulasi ini agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini.	tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan			
8	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial	-	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2007 Tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan,	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	-	SELESAI

	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015			Kesejahteraan Sosial		
10	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Desa	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial	-	SELESAI
12	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007	23 Agustus 2007	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2007 Tentang Peningkatan Status Kantor Perhubungan Dan Pariwisata Menjadi Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara	30 Mei 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2007 Tentang Pembentukan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara	30 Mei 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No.	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI

			11 Thn 2008					
15	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2007 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Di Kabupaten Penajam Paser Utara	30 Mei 2007	Berlaku	<p>a) Dalam PERDA ini, secara khusus tidak ada Pasal memerintahkan untuk membuat Pedoman Pelaksanaan dari PERDA, kecuali Pasal 18 yang dapat dianggap pasal delegasi blanko;</p> <p>b) Namun demikian, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Penjabaran PERDA ini melalui Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan.</p>	Menetapkan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Di Kabupaten Penajam Paser Utara.	Dinas Pertanian	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2007 Tentang Ijin Reklame	30 Mei 2007	Berlaku	Dalam PERDA ini sekitar 10 Pasal yang mengatur kewenangan penetapan Bupati dalam pelaksanaan Reklame termasuk aturan teknis pelaksanaannya, yakni: pada Pasal 1 angka 38, Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) serta Pasal 19.	Menetapkan PERBUP ttg Pedoman Pelaksanaan PERDA.	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	TIDAK ADA PENGAJUAN RAPERBUP	BELUM SELESAI
17	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2007 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan	30 Mei 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 8 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	-	SELESAI

Tahun 2008								
1	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara	16 Oktober 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara	16 Oktober 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Bupati No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	16 Oktober 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	16 Oktober 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam	16 Oktober 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI

	Paser Utara							
6	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah	16 Oktober 2008	Berlaku	<p>a) PERDA ini diterbitkan berdasarkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan PP ini merupakan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan telah diubah dengan UU Cipta Kerja terakhir dengan UU 6 Tahun 2023.</p> <p>b) Namun UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 2007 telah beberapa kali diubah.</p> <p>c) Berdasarkan hal, seyogyanya PERDA No. 8 Thn 2008 ttg Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah, dievaluasi apakah Substansi yang diatur termasuk lampiran detail kewenangan Daerah masih relevan atau ada yang tidak sesuai dengan Peraturan perundungan</p>	Mengevaluasi PERDA No. 8 Thn 2008 ttg Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	BELUM SELESAI

				yang lebih tinggi.				
7	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 4 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2013	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2008 Tentang Retribusi Jasa Laboratorium Dan Workshop	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 4 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI

12	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2013	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	13 Agustus 2008	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
<b>Tahun 2009</b>								
1	Peraturan Daerah No. 31 Thn 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	24 Desember 2009	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 30 Thn 2009 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa	03 Desember 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 29 Thn 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa	03 Desember 2009	Berlaku	a) PERDA ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. b) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan	a) Karena dalam PERDA No. 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 13 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	BELUM SELESAI

				Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. c) PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 89: Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota. d) Telah diterbitkan PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam PERBUP ini ketentuan RKPDesa dan RPJMDesa diatur, namun tidak lengkap pengaturan teknis penyusunan RPJMDesa.	2015 sehubungan dengan adanya Perubahan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norma pencabutan. b) Menyempurnakan PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.		
4	Peraturan Daerah No. 28 Thn 2009 Tentang Penetapan Jenis Urusan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara	03 Desember 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SELESAI

	Yang Diserahkan Kepada Desa		Daerah No. 1 Thn 2015					
5	Peraturan Daerah No. 27 Thn 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009	10 September 2009	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 25 Thn 2009 Tentang Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Usaha Pertambangan	30 Juli 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan	-	BELUM SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 24 Thn 2009 Tentang Ijin Usaha Perikanan	30 Juli 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan	-	BELUM SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 23 Thn 2009 Tentang Perijinan Budidaya Ikan	30 Juli 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan	-	BELUM SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 22 Thn 2009 Tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan	30 Juli 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 21 Thn 2009 Tentang Hutan Kota Kabupaten Penajam Paser Utara	30 Juli 2009	Berlaku	-	-	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan	-	BELUM SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 20 Thn 2009 Tentang Kerjasama Pemerintah	30 Juli 2009	Berlaku	-	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan	-	BELUM SELESAI

	Daerah Dengan Badan Hukum Dalam Penyediaan Sumber Daya Tenaga Listrik					Perdagangan		
12	Peraturan Daerah No. 19 Thn 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	04 Juni 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 6 Thn 2018	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2009 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	04 Juni 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Bagian Pemeritahan Sekretariat Daerah	-	BELUM SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2009 Tentang Ketertiban Umum	03 Juni 2009	Berlaku	-	-	Bagian Pemeritahan Sekretariat Daerah	-	BELUM SELESAI
15	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2009 Tentang Izin Usaha Perkebunan	04 Juni 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 25 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan	-	SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	04 Juni 2009	Berlaku	a) PERDA ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. b) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-	PERDA ini perlu Evaluasi	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	BELUM SELESAI

				undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.				
17	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2009 Tentang Sumber Pendapatan Desa	04 Juni 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	BELUM SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2009 Tentang Alokasi Dana Desa	04 Juni 2009	Tidak Punya Daya Guna	<p>a) Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada ketentuan yang mengatur Alokasi Dana Desa ADD, Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), bahwa Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Dan (Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>b) Hal ini diperkuat dengan dilakukannya Perintah PP tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana</p>	<p>Karena dalam PERDA No. 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 13 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norma pencabutan.</p>	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI

				Desa.				
19	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	04 Juni 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 5 Thn 2025	<p>a) Telah terbit PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>b) Dalam Pasal 100 PP No. 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Perda ini disebutkan juga dalam asal 3 huruf a PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.</p>	Perlu merevisi atau melakukan Pembentukan PERDA baru yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	SEDANG DALAM PROSES PENETAPAN BUPATI	BELUM SELESAI
20	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2009 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Dan Pembangunan Daerah	29 April 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	-	BELUM SELESAI
21	Peraturan Daerah No. 10	29 April	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Badan	-	SELESAI

	Thn 2009 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	2009	Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	berlaku.		Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
22	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2009 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	29 April 2009	Tidak Punya Daya Guna	<p>1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 31 Ayata (2) dan Ayat (3) dan diperkuat Pasal 73 bahwa Sekretaris Desa mengoorminasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan</p>	<p>a) Karena dalam PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 9 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norma pencabutan.</p> <p>b) Walaupun Pemerintah Daerah telah menetapkan PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah iubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg 2) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam</p>	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	<p>1) PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa. 2) PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg 2) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p>	SELESAI

			<p>Bupati/Wali Kota setiap tahun. Dan Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat: a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa; b. prinsip penyusunan APB Desa; c. kebijakan penyusunan APB Desa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal khusus lainnya.</p> <p>2) Karena berdasarkan perintah delegasi PER MENDAGRI tersebut</p>	<p>PERBUP tersebut dimuat ketentuan teknis Penyusunan APB Desa, tetapi beberapa hal yang belum diatur seperti sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa dan lain.</p> <p>c) Menyarangkan agar dapat dilakukan evaluasi apakah PERBUP No. 7 Thn 2019 disempurnakan atau dilakukan pemisahan pengaturan khusus Pedoma Penyusunan APBDesa terpisah dari Pedomen Pengelolan Keuangan Desa.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				PERDA No. 9 Thn 2009 tidak memiliki daya Guna; 3) Perintah delegasi PER MENDAGRI telah dilaksanakan dengan ditetapkannya PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa.				
23	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2009 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	29 April 2009	Tidak Punya Daya Guna	a) Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada ketentuan mengatur Perangkat Desa Pasal 70: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.  b) Walaupun dalam Permendagri 83 Thn 2015 dan Perubahannya tidak ada perintah delegasi Penetapan	Karena dalam PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 8 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norma pencabutan.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI

				Perda/Perkada, namun dengan ditetapkannya PERDA No. 1 Thn 2015 ttg Desa, menjadi PERDA No. 8 Thn 2009 tidak memiliki daya guna. karena dalam sesuai dengan Pasal 108 PERDA No. 1 Thn 2015 ttg Desa diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.				
24	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Desa	29 April 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
25	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	29 April 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2018	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
26	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2009 Tentang Izin Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	BELUM SELESAI
27	Peraturan Daerah No. 4	29 April	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Kesehatan	-	BELUM SELESAI

	Thn 2009 Tentang Ijin Penyelenggaraan Sarana Dan Tenaga Kesehatan	2009						
28	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2009 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Dan Berita Daerah	29 April 2009	Berlaku	-	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
29	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	28 Januari 2009	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
30	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008-2013	28 Januari 2009	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencana Pembangunan Daerah	-	SELESAI
<b>Tahun 2010</b>								
1	Peraturan Daerah No. 20 Thn 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011	27 Desember 2010	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 19 Thn 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada PT. Bank Pembangunan Rakyat Syariah Ibadurahman Penajam Untuk Penguatan Modal Usaha	09 Desember 2010	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan: a) Penganggaran APBD TA 2005. b) Penganggaran APBD TA 2006. c) Penganggaran APBD TA 2010.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI

	Mikro, Kecil Dan Menengah							
3	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	09 Desember 2010	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan: a) Penganggaran APBD TA 2003. b) Penganggaran APBD TA 2004. c) Penganggaran APBD TA 2005. d) Penganggaran APBD TA 2010.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2010	13 Oktober 2010	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2010 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009	11 Oktober 2010	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2010 Tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir	16 Juni 2010	Berlaku	-	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1) PERBUP No. 12 Thn 2017 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir. 2) PERBUP No. 4 Thn 2022 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati	SELESAI

							Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir.	
7	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	16 Juni 2010	Berlaku	-	-	Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan;	-	SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2010 Tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan	16 Juni 2010	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan untuk membentuk PERBUP dalam 15 materi Muatan Pasal, yakni: Pasal 4 ayat(3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), dan Pasal 43 ayat (3).	a) Perlu menetapkan PERBUP yang mengatur pertunjuk pelaksanaan PERDA, walaupu ada beberapa PERBUP yang diterbitkan tetapi sebagian besar amanat PERDA menjadi muatan dalam pengaturan PERBUP.  b) PERDA ini secara umum disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU ini masih berlaku, namun demikian perlu dilakukan evaluasi	Dinas Pendidikan dan Olahraga	a) PERBUP No. 32 Thn 2018 ttg Pendirian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi Daerah. b) PERBUP No. 16 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. (Mencabut PERBUP No. 18 Thn 2012). c) PERBUP No. 19 Thn 2020 ttg Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar. d) PERBUP No. 54 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.	BELUM SELESAI

					terkait regulasi baru sebagai penjabaran UU Sikdiknas tersebut. c) Berdasarkan hal tersebut diatas sangat terbuka untuk dilakukan Penyempurnaan PERDA atau Pembentukan PERDA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.			
9	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Giri Purwa Di Kecamatan Penajam	16 Juni 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2010 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	08 Februari 2010	Berlaku	-	-	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	08 Februari 2010	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI

12	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	08 Februari 2010	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Labangka Barat Di Kecamatan Babulu	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Binuang Dan Desa Telemow Di Kecamatan Sepaku	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
15	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Sidorejo Di Kecamatan Penajam	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Bangun Mulya Di Kecamatan Waru	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
17	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Gunung Mulia Di	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	-	SELESAI

	Kecamatan Babulu					Desa		
18	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2010 Tentang Pengelolaan Sampah	08 Februari 2010	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 4 Thn 2021	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Lingkungan Hidup	-	SELESAI
19	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010	20 Januari 2010	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
<b>Tahun 2011</b>								
1	Peraturan Daerah No. 23 Thn 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	27 Desember 2011	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 22 Thn 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	27 Desember 2011	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 21 Thn 2011 Tentang Pajak Hiburan	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 20 Thn 2011 Tentang Pajak	29 November	(Tidak Berlaku)	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas Pendapatan	-	SELESAI

	Reklame	2011	Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	berlaku.		Daerah		
5	Peraturan Daerah No. 19 Thn 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2011 Tentang Pajak Parkir	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2011 Tentang Retribusi Terminal	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI

			Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024					
10	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
12	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011	24 November 2011	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Penajam	08 September 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI

	Paser Utara		Daerah No. 1 Thn 2024					
15	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2011 Tentang Pajak Restoran Di Kabupaten Penajam Paser Utara	08 September 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kabupaten Penajam Paser Utara	08 September 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
17	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kabupaten Penajam Paser Utara	08 September 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara	06 Juli 2011	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2011.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
19	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22 Maret 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI

			Daerah No. 1 Thn 2024					
20	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2011 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	22 Maret 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
21	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet	22 Maret 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
22	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	14 Maret 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
23	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	05 Januari 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
<b>Tahun 2012</b>								
1	Peraturan Daerah No. 25 Thn 2012 Tentang Izin	28 Desember	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	-	BELUM SELESAI

	Usaha Perkebunan Di Kabupaten Penajam Paser Utara	2012						
2	Peraturan Daerah No. 24 Thn 2012 Tentang Pengelolaan Hutan Mangrove	28 Desember 2012	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur teknis Pengelolaan Hutan Mangrove pada Pasal 5, Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 28.	Menerbitkan PERBUP yang mengatur Pedoman teknis Pengelolaan Hutan Mangrove .	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 23 Thn 2012 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran	28 Desember 2012	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur teknis Pendidikan Baca Tulis Al-Quran pada Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2).	Menerbitkan PERBUP yang mengatur Pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Quran.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	PERBUP No. 9 Thn 2023 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Quran Di Daerah.	SELESAI (Catatan: agar materi diatur dievaluasi, apakah telah mengakomodir seluruh amanat Pasal dalam PERDA)
4	Peraturan Daerah No. 22 Thn 2012 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara	28 Desember 2012	Berlaku	Menetapkan PERBUP yang mengatur teknis kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Pasal 20).	a) Menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara. b) Materi Pasal PERBUP dapat mengatur Teknis Pelaksanaan secara keseluruhan dari PERDA. c) Materi PERBUP dapat saling terkait dengan PERDA No. 22 Thn 2012 ttg Pembinaan dan Pengembangan	Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

					Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.			
5	Peraturan Daerah No. 21 Thn 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan	28 Desember 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 20 Thn 2012 Tentang Izin Gangguan	28 Desember 2012	Tidak Punya Daya Guna	<p>a) PERDA No. 20 Thn 2012 ttg Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan delegasi/perintah dari Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah pada Pasal 2 ayat (1), Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah.</p> <p>b) Telah terbit PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Nomor</p>	PERDA No. 20 Thn 2012 ttg Izin Gangguan, disarankan untuk dicabut.	Bagian Perekonominan Sekretariat Daerah	TIDAK ADA PENGAJUAN UNTUK PENCABUTAN	BELUM SELESAI

				27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah yang dalam pertimbangannya disebutkan bahwa bahwa PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu dicabut. c) Subtasnsi yang diatur dalam PERDA No. 20 Thn 2012 ttg Izin Gangguan mengenai Retribusi Izin Gangguang juga bertentangan dengan PERDA 1 Thn 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dareah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga PERDA No. 20 Thn 2012 sudah tidak dilaksanakan/diterapkan di Daerah.			
7	Peraturan Daerah No. 19 Thn 2012 Tentang Anggaran Pendapatan	28 Desember 2012	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun	-	Bagian Keuangan Sekretariat - SELESAI	

	dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013			pelaksanaan kegiatan.		Daerah		
8	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2012 Tentang Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara	17 Desember 2012	Berlaku	a) Berdasarkan Pasal 3 : Sumber dana penyertaan modal bersumber dari APBD yang dianggarkan mulai tahun sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kemampuan keuangan daerah.  b) Masih didentifikasi apakah Penyertaan Modal telah dilaksanakan.	Perlu diidentifikasi apakah apakah Dana Penyertaan Modal telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	-	BELUM TERIDENTIFIKASI
9	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara	05 Desember 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara	05 Desember 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi	05 Desember 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI

	Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		Daerah No. 3 Thn 2016					
12	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012	19 Oktober 2012	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011	19 Oktober 2012	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	03 September 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2017	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Perekonominian Sekretariat Daerah		SELESAI
15	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	03 September 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Kesehatan		SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2012 Tentang	03 September	(Tidak Berlaku)	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas Kesehatan	PERBUP No. 20 Thn 2017 ttg Petunjuk Teknis	SELESAI

	Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Penajam Paser Utara	2012	Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 14 Thn 2017	berlaku.			Pelaksanaan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan.	
17	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	03 September 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pekerjaan Umum	-	SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan	03 September 2012	Berlaku	Berdasarkan peraturan perundang-undangan istilah Izin Mendirikan Bangunan sudah diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	PERDA perlu segera diganti	Dinas Pekerjaan Umum	-	BELUM PROSES
19	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	03 September 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	-	SELESAI
20	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2012 Tentang Menara Telekomunikasi	03 September 2012	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan sebagai berikut: a) Pasal 5 ayat (2): Rencana Induk Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD. b) Pasal 28 ayat (4): Tata Cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara	Menetapkan PERBUP sebagai Pedoman Teknis pelaksanaan PERDA.	Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

				diatur dengan Peraturan Bupati.  c) Pasal 40 ayat (7): Ketentuan mengenai prosedur relokasi dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. dan  d) Pasal 41: Hal yang belum diatur ditetapkan dengan PERBUP.				
21	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	03 September 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
22	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	03 September 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
23	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2012 Tentang Izin Usaha Perdagangan	30 Juli 2012	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	BELUM SELESAI
24	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2012 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf	30 Juli 2012	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada:  Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 Ayat	Menerbitkan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan PERDA.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	BELUM DIAJUKAN	BELUM SELESAI

				(4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21, Pasal 29, Pasal 32 dan Pasal 45.				
25	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025	19 April 2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 6 Thn 2025	PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP ttg Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat 2)	Menerbitkan PERBUP ttg Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat 2).	Badan Perencana Pembangunan Daerah	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
<b>Tahun 2013</b>								
1	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 deee	18 November 2013	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	15 November 2013	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam	07 November 2013	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI

	Paser Utara							
4	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2013 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah	12 September 2013	Berlaku	<p>PERDA ini mengamanatkan untuk membuat PERBUP sebagai teknis pelaksanaan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasal 35 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan diatur dalam Peraturan Bupati.</li> <li>b) Pasal 37 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Sekretariat Majelis Pertimbangan diatur dalam Peraturan Bupati.</li> </ul>	Menetapkan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan PERDA.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	<p>a) PERBUP No. 47 Thn 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah. b) PERBUP No. 24 Thn 2020 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah.</p>	SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Penajam Paser Utara	12 September 2013	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2013.	-	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	17 Juni 2013	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 2	17 Juni	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas	-	SELESAI

	Thn 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2013	Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	berlaku.		Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata;		
8	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan	17 Juni 2013	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah		SELESAI
<b>Tahun 2014</b>								
1	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015	31 Desember 2014	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	31 Desember 2014	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2015.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013	04 Desember 2014	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 10	24	Tidak Punya			Bagian	-	SELESAI

	Thn 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014	November 2014	Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Keuangan Sekretariat Daerah		
5	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	29 September 2014	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah		SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	29 September 2014	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Bupati No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah		SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	29 September 2014	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah		SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor	29 September 2014	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat		SELESAI

	9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016			Daerah		
9	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak	29 September 2014	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini sudah tidak memiliki daya guna sejak terbitnya: a) PERDA No. 7 Thn 2022 ttg Sistem Perlindungan Anak; b) PERDA No. 1 Thn 2023 ttg Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.	-	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018	02 September 2014	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencana Pembangunan Daerah	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033	01 Juli 2014	Berlaku	a) PERDA ini mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033. b) Saat ini dilakukan revisi terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.	PERDA ini seyogyanya dijabarkan dalam PERBUP yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).	Dinas Pekerjaan Umum	a) SAAT INI dilakukan proses pembentukan PERBUP RDTR untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Serambi Nusantara Koridor Maridan-Riko- Sepan-Sotek dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Serambi Nusantara Koridor Penajam-Petung.	SEBAGIAN SELESAI (Catatan: RDTR yang lain masih akan diajukan)
12	Peraturan Daerah No. 2	03 Februari	Tidak Punya	PERDA ini tidak mempunyai	-	Bagian	-	SELESAI

	Thn 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014	2014	Daya Guna	daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.		Keuangan Sekretariat Daerah		
13	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	27 Januari 2014	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI
<b>Tahun 2015</b>								
1	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016	31 Desember 2015	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015	02 Desember 2015	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014	11 November 2015	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2015 Tentang	14 September	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan Agar menetapkan	Dinas Pekerjaan Umum	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI	

	Bangunan Gedung	2015		pembentukan PERBUP sebagai teknis pelaksanaan PERDA sekitar 46 Pasal,	PERBUP sebagai pedoman teknis pelaksanaan PERDA			
5	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Penajam Paser Utara	02 September 2015	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	02 September 2015	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur tentang Uraian Kawan Tanpa Rokok pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).	Membentuk PETBUP tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	-	BELUM SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015 Tentang Desa	02 September 2015	Berlaku	Dalam PERDA ini ada beberapa pengaturan pembentukan PERBUP, yang muatan materinya merupakan bersifat pedoman teknis PERDA yakni:  a) Pasal 20 ayat (4): Kriteria dan tata cara perubahan status Kelurahan menjadi Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  b) Pasal 27 ayat (5): Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	a) Menetapkan PERBUP sebagai pedoman teknis, baik dalam beberapa PERBUP.  b) Muatan materinya berdasarkan amanat Pasal dalam PERDA dapat digabung sesuai dengan materi yang dapat disatukan atau dipisah apabila bentuk PERBUP yang terpisah tersebut lebih sesuai.  c) Melakukan Penyempurnaan PERDA sehubungan dengan ada UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta banyak	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	a) PERBUP No. 14 Thn 2024 ttg Pengangkatan Dan Honorarium Staf Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa; b) PERBUP No. 13 Thn 2024 ttg Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;  c) PERBUP No. 1 Thn 2024 ttg Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa; d) PERBUP No. 35 Thn 2023 ttg Petunjuk Teknis Transaksi Nontunai Penerimaan Dan Pengeluaran Desa; f) PERBUP No. 22 Thn 2022	a) SELESAI (Juknis PERBUP)  b) BELUM SELESAI (Untuk penyesuaian dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta banyak PERMENDAGRI yang terbit yang mengatur desa sehingga perlu segera disesuaikan).  d) PERBUP No. 35 Thn 2023 ttg Petunjuk Teknis Transaksi Nontunai Penerimaan Dan Pengeluaran Desa; f) PERBUP No. 22 Thn 2022

			<p>c) Pasal 40: Bentuk dan sistematika laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>d) Pasal 47: Tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>e) Pasal 80: Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>f) Pasal 90 ayat (4): Tata cara penetapan calon Kepala Desa terpilih, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>g) Pasal 95: Tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada</p>	<p>PERMENDAGRI yang terbit yang mengatur desa sehingga perlu segera disesuaikan.</p>		<p>ttg Pengelolaan Aset Desa; g) PERBUP No. 15 Thn 2022 ttg Pedoman Teknis Pengangkatan Pemberhentian Dan Cuti Perangkat Desa; i) PERBUP No. 39 Thn 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa; l) PERBUP No. 8 Thn 2021 ttg Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan PERBUP No. 13 Thn 2023; n) PERBUP No. 33 Thn 2020 ttg Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; o) PERBUP No. 9 Thn 2020 ttg Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa; p) PERBUP No. 4 Thn 2020 ttg Insentif Rukun Tetangga Desa/Kelurahan; q) PERBUP No. 2 Thn 2020 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dan Perdesaan Mandiri; r) PERBUP No. 35 Thn 2019 ttg Pedoman Pengelolaan</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--

			<p>Peraturan Menteri.</p> <p>h) Pasal 108: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>i) Pasal 109 ayat (2): Tata cara mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>j) Pasal 121 ayat (7) Tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>k) Pasal 125: Pengaturan lebih lanjut mengenai tata tertib BPD diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>l) Pasal 127 ayat (5): Tata cara mengenai tata tertib dan pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati</p>		<p>Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Di Desa; s) PERBUP No. 30 Thn 2019 ttg Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 34 Thn 2020; t) PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021; u) PERBUP No. 4 Thn 2019 ttg Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; p) PERBUP No. 19 Thn 2018 ttg Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pendanaan, Pembubaran, Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa; w) PERBUP No. 2 Thn 2018 ttg Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; x) PERBUP No. 55 Thn 2017 ttg Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa; dan y) PERBUP No. 15 Thn 2017 ttg Pedoman Tata Cara</p>	
--	--	--	---	--	---	--

			<p>berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>l) Pasal 129: Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>m) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>n) Pasal 139 : Pasal Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>o) Pasal 140 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, Pendanaan, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>p) Pasal 147 : Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Bupati</p>		Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 32 Thn 2021.	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>q) Pasal 148 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>r) Pasal 149 ayat (2) : Tata cara pembentukan lembaga adat Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>s) Pasal 157: Lembaga kemasyarakatan Desa yang sudah ada masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya lembaga kemasyarakatan Desa yang baru berdasarkan peraturan t)Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.</p> <p>t) Pengaturan Desa Persiapan dalam bentuk Peraturan Bupati juga ada, sepanjang ada pengusulan pembentukan.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

Tahun 2016							
1	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat	15 Desember 2016	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan PERBUP yang mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,	Menerbitkan PERBUP yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setretariat	a) PERBUP No. 22 Thn 2017 sampai dengan PERBUP No. 54 Thn 2027 (33 PERBUP). b)PERBUP

	Daerah			susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 4).	fungsi, serta tata kerja sebagai pelaksanaan PERDA.	Daerah	No. 36 Thn 2019 (mengubah PERBUP 22 Thn 2017);	
2	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016	05 Desember 2016	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	29 November 2016	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	SELESAI
<b>Tahun 2017</b>								
1	Peraturan Daerah No. 21 Thn 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018	29 Desember 2017	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	-	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 20 Thn 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017	22 November 2017	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	PERBUP No. 64 Thn 2017 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017.	SELESAI

3	Peraturan Daerah No. 19 Thn 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018	21 November 2017	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2017 Tentang Izin Membuka Tanah Negara	21 November 2017	Berlaku	Dalam PERDA mengamanatkan Pembentukan PERBUP dengan perintah 3 materi Pasal.	Perlu menetapkan PERBUP sebagai pedoman pelaksanaan.	Bagian Pemerintahan (Inisiatif DPRD)	-	BELUM SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	21 November 2017	Berlaku	<p>a) PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP yang mengatur pembentukan asosiasi pengusahaan sarang burung Walet di Daerah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi pengusahaan sarang burung walet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>b) Kebutuhan atas keberadaan PERBUP diatas, karena dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pemegang izin (Pengelolaan Dan</p>	Menetapkan PERBUP sebagai pelaksanaan PERDA.	Dinas Peternakan	BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

				Pengusahaan Sarang Burung Walet) diwajibkan terdaftar sebagai anggota asosiasi pengusahaan sarang burung Walet di Daerah.				
6	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2017 Tentang Pinjaman Daerah Pada Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur	21 November 2017	Berlaku	-	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	-	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2017 Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan	21 November 2017	Berlaku	PERDA mengamanatkan pada: Pasal 9 ayat (2) bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengajuan pemberian nama Jalan dan perubahan nama Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.	Agar menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Teknis Pemberian Nama Jalan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2017 Tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah	21 November 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP pada: Pasal 5 ayat (3) Ketentuan mengenai perencanaan, proses pendaftaran, pembayaran iuran jaminan kesehatan, pembiayaan diluar manfaat yang ditanggung BPJS, persyaratan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	Agar menetapkan PERBUP yang mengatur Pertunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dengan menyesuaikan program nasional di bidang kesehatan.	Dinas Kesehatan	PERBUP No. 18 Thn 2019 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah.	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka	21 November 2017	Berlaku	Perlu dilakukan perkuatan Regulasi Pelaksanaan (Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada	Menyusun secara komprehensip regulasi turunan dalam rangka pelaksaan tugas dan wewenang Perumda	Bagian Perekonominan Sekretariat Daerah	1) PERBUP No. 38 Thn 2021 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah. 2) PERBUP No.	SELESAI (Catatan: Mengvaluasi Regulasi Secara Komprehensip

				berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang seyogyanya disempurnakan dalam rangka memayungi operasional dan kinerja perusahaan.	Benuo Taka Energi		28 Thn 2022 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah. 3) PERBUP No. 22 Thn 2024 ttg Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Untuk Penyediaan Infrastruktur Dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara.	yang dibutuhkan dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi Permerintah Daerah dengan Penetapan oleh Kepala Daerah)
10	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2017 Tentang Penyelenggaraan Agribisnis Dan Agroindustri	21 November 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan dengan 5 Pasal untuk membentuk PERBUP pada: Pasal 33, Pasal 43 ayat (4), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 57.	Agar Menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Agribisnis Dan Agroindustri.	Dinas Pertanian (Inisiatif DPRD)	BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2017 Tentang Kepelabuhanan	21 November 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP sebagai pedoman teknis PERDA pada:  a) Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan (di Pelabuhan) diatur dengan Peraturan Bupati.  b) Pasal 9: pedoman tata cara penetapan lokasi	Agar dapat membentuk PERBUP yang mengatur Pedoman teknis PERDA.	Dinas Perhubungan	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

				<p>untuk penyelenggaraan pelabuhan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>c) Pasal ayat (4) dan ayat (5): Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dsan Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>d) Pasal 13: Ketentuan mengenai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>e) Pembentukan Dewan Kelautan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati (bersifat pilihan).</p>			
12	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan	21 November 2017	Berlaku	<p>a) PERDA No. 10 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan</p>	<p>a) Menyarankan untuk melakukan evaluasi Materi PERDA apakah ada yang bertentangan dengan Peraturan</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	BELUM SELESAI

	Administrasi Kependudukan			Administrasi Kependudukan, memuat 10 Pasal yang memerintahkan pembentukan PERBUP termasuk yang ada dalam PERDA awal.  c) Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.	perundang-undangan yang lebih tinggi, b) Menyarankan membentuk PERBUP yang mengatur Pedoman teknis PERDA.			
13	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara	21 November 2017	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2017.	-	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2017 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal	01 November 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanat Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (8), Pasal 33 ayat (4), Pasal 37 ayat (4),	Menetapkan PERBUP ttg Pedoman Pelaksanaan PERDA.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Inisiatif DPRD)	TIDAK ADA PENGAJUAN RAPERBUP	BELUM SELESAI

				Pasal 44 ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (3).				
15	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	12 Oktober 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanat Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (3).	Menetapkan PERBUP ttg Pedoman Pelaksanaan PERDA.	Badan Keuangan	a) PERBUP No. 12 Thn 2024 ttg Perubahan Ketiga Atas PERBUP No. 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab PPU. b) PERBUP No. 36 Thn 2021 ttg Perubahan Kedua Atas PERBUP No. 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab PPU. c) PERBUP No. 4 Thn 2018 ttg Perubahan Atas PERBUP No. 61 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab PPU. d) PERBUP No. 61 Thn 2017 ttg Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kab PPU.	SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2017 Tentang	14 September	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan	-	Bagian Perekonomian	-	SELESAI

	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum	2017		Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2017.		Sekretariat Daerah		
17	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	11 September 2017	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	-	SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2017 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	29 Agustus 2017	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada Pasal 6 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 31, Pasal 39 ayat (4), Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 49.	Agar menetapkan PERBUP sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan PERDA.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	a) PERBUP No. 1 Thn 2025 ttg Bela dan Beli Produk Serambi Nusantara. b) Materi dalam PERBUP diatas hanya sebagian kecil dari pelaksanaan PERDA, terkait dengan teknis pelaksanaan sesuai amanat PERDA tidak diatur.	BELUM SELESAI
19	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	29 Agustus 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (3)	Menetapkan PERBUP yang mengatur Pelaksanaan PERDA.	Bagian Perekonominan Sekretariat Daerah	a) PERBUP No. 16 Thn 2023 ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PengeiOlaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.(Berlaku) b) PERBUP No. 15 Thn 2020	SELESAI

							ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.(Tidak Berlaku-dicabut dengan PERBUP No. 16 Thn 2023)	
20	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2017 Tentang Pelestarian Dan Perlindungan Adat Paser	29 Agustus 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP terhadap Kegiatan Pelestarian berupa Hasil Inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan(Pasal 2 ayat 2 huruf a, ayat 3 dan ayat 4).	a) Membentuk PERBUP terhadap Hasil Inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan. b) Pembentukan PERBUP dilaksanakan apabila ada usulan dari Lembaga Adat Paser.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Inisiatif DPRD)	-	SELESAI
21	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017	07 Februari 2017	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 6).  b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	a) PERBUP No. 3 Thn 2017 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017. b) PERBUP No. 8 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja	SELESAI

							Daerah Tahun Anggaran 2017.	
<b>Tahun 2018</b>								
1	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019	21 Desember 2018	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 6)  b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	PERBUP No. 44 Thn 2018 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	08 November 2018	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 12).  b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	PERBUP No. 33 Thn 2018 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan	10 September 2018	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan hanya menguatkan beberapa muatan Materi Pasal, amanat pembentukan PERBUP melengkapi PERBUP 12 Thn 2010, dengan muatan 15	a) Perlu menetapkan PERBUP yang mengatur pertunjuk pelaksanaan PERDA, walaupu ada beberapa PERBUP yang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	a) PERBUP No. 32 Thn 2018 ttg Pendirian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi Daerah. b) PERBUP No. 16 Thn 2020	BELUM SELESAI

	Pendidikan			<p>Pasal yang mengatur ketentuan Pembentukan PERBUP.</p> <p>diterbitkan tetapi sebaian besar amanat PERDA menjadi muatan dalam pengaturan PERBUP.</p> <p>b) PERDA ini secara umum disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU ini masih berlaku, namun demikian perlu dilakukan evaluasi terkait regulasi baru sebagai penjabaran UU Sikdiknas tersebut.</p> <p>c) Berdasarkan hal tersebut diatas sangat terbuka untuk dilakukan Penyempurnaan PERDA atau Pembentukan PERDA yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.</p>		<p>ttg Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. (Mencabut PERBUP No. 18 Thn 2012). c) PERBUP No. 19 Thn 2020 ttg Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar. d) PERBUP No. 54 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.</p>		
4	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	28 Agustus 2018	Berlaku	<p>a) Dalam PERDA ini, sekitar 18 Pasal yang mengatur pembentukan PERBUP.</p> <p>b) Seiring dengan terbitnya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam</p>	<p>a) Melakukan Perubahan PERDA sesuai dengan PP dan PERMENDAGRI.</p> <p>b) Beberapa PERBUP Pelaksanaan dapat didahulukan</p>	<p>Badan Keuangan</p>	<p>a) PERBUP No. 41 Thn 2024 ttg Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah. b) PERBUP No. 48 Thn 2020 ttg Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang</p>	<p>BELUM SELESAI (Catatan: Masih banyak materi muatan PERDA yang belum dibuatkan PERBUP sebagai</p>

				<p>Negeri (PERMENDAGRI) yang menjadi Dasar Hukum utama pembentukan Peraturan Daerah ini, sehingga ada beberapa pengaturan yang perlu disempurnakan.</p> <p>c) PP 24 Tahun 2014 Pasal 105: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Penyesuaianya dengan aturan terbaru di atas.</p>		<p>Milik Daerah. c) PERBUP ttg Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun. d) Sebagian besar materi muatan Pasal dalam PERDA belum dibuat PERBUP sebagai teknis pelaksanaan.</p>	<p>teknis Pelaksanaan PERDA)</p>
5	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	28 Agustus 2018	Berlaku	<p>PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP dalam 3 muatan Pasal yakni:</p> <p>a) padsa Pasal 12 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan rincian kegiatan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>b) Pasal 15 ayat (3) bahwa Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>c) Pasal 16 ayat (4) bahwa Tatacara penyusunan data kemiskinan sebagaimana</p>	<p>a) Segera membuat PERBUP sebagai Pelaksanaan PERDA khususnya pada perintah Pasal 12, Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4).</p> <p>b) Pembentukan PERBUP berdasarkan PERDA dapat disusun dalam beberapa PERBUP sesuai kebutuhan dan kemudahan dalam penerapan di Daerah.</p>	Dinas Sosial	<p>Dalam PROPEMPERBUP Thn 2025 telah tertuang judul Rancangan PERBUP ttg Data Cara Pemutakhiran Data Warga di Daerah/ Indikator Kemiskinan.</p>	<p>BELUM PROSES (Catatan: Dokumen Tidak Lengkap)</p>

				dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.				
6	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah	28 Agustus 2018	Berlaku	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Perlu menyusun PERBUP ttg tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Inisiatif DPRD)		BELUM SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	08 Juni 2018	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Kesehatan	-	SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan	08 Juni 2018	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Keuangan	-	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	08 Juni 2018	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	RSUD	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2018 Tentang	08 Juni 2018	(Tidak Berlaku)	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Perhubungan	-	SELESAI

	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 6 Thn 2018					
11	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2018 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	08 Juni 2018	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Perhubungan	-	SELESAI
12	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2018 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	08 Juni 2018	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	08 Juni 2018	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum	25 April 2018	Berlaku	Belum Ada Pedoman Teknis Tata Cara Penyertaan Modal Daerah	Agar segera menyusun Raperbup Pedoman Teknis	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	-	BELUM ADA
<b>Tahun 2019</b>								
1	Peraturan Daerah No. 20 Thn 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	27 Desember 2019	Tidak Punya Daya Guna	a) Berdasarkan PERDA ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang	Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja	Badan Keuangan	PERBUP No. 38 Thn 2019 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten	SELESAI

	Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020			Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 9).  b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.		Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.	
2	Peraturan Daerah No. 19 Thn 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara	11 Desember 2019	Berlaku	Belum Ada Pedoman Teknis Tata Cara Penyertaan Modal Daerah	Agar segera menyusun Raperbup Pedoman Teknis	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	-	BELUM ADA
3	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019	21 Agustus 2019	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 6).  b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Menetapkan PERBUP ttg Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.	Badan Keuangan	PERBUP No. 20 Thn 2019 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	21 Agustus 2019	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	PERBUP No. 19 Thn 2019 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	SELESAI

	Daerah Tahun Anggaran 2018					Daerah Tahun Anggaran 2019.		
5	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI

10	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
12	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	-	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Pendapatan Daerah	-	SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Pendapatan Daerah	-	SELESAI
15	Peraturan Daerah No. 6	07 Mei 2019	(Tidak			Badan	-	SELESAI

	Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah		Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Pendapatan Derah		
16	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		SELESAI
17	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	07 Mei 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi	29 April 2019	Berlaku	Perlu dilakukan perkuatan Regulasi Pelaksanaan (Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang seyogyanya disempurnakan dalam rangka memayungi operasional dan kinerja perusahaan.	Menyusun secara komprehensip regulasi turunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Perumda Benuo Taka Energi	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	1) PERBUP No. 38 Thn 2021 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah. 2) PERBUP No. 28 Thn 2022 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.	SELESAI (Catatan: Mengvaluasi Regulasi Secara Komprehensip yang dibutuhkan dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi Permerintah Daerah dengan Penetapan oleh Kepala Daerah)
19	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan	29 April 2019	(Tidak Berlaku) Dicabut	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Perhubungan		SELESAI

	Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024					
20	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023	18 Maret 2019	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	-	SELESAI
<b>Tahun 2020</b>								
1	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021	30 Desember 2020	Tidak Punya Daya Guna	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 18).</li> <li>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>	Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perbup 55 Thn 2020 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka	21 Desember 2020	Berlaku	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam Lampiran disebutkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran,</li> </ul>	Menetapkan PERBUP ttg Pengelolaan penyertaan modal daerah.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah/BKAD	Rancangan PERBUP ttg Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang masih penyempurnaan bersama BKAD/Bagian Perekonomian Setkab.	DALAM PROSES

				<p>pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.</p> <p>b) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.</p> <p>c) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.</p>				
3	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi	21 Desember 2020	Berlaku	<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam Lampiran disebutkan bahwa:</p> <p>a) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.</p> <p>b) Pengelolaan penyertaan</p>	Menetapkan PERBUP ttg Pengelolaan penyertaan modal daerah.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Rancangan PERBUP ttg Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang masih penyempurnaan bersama BKAD/Bagian Perekonomian Setkab.	DALAM PROSES

				modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. c) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.				
4	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020	15 Oktober 2020	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 6). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1) Perbup 42 Thn 2020 ttg Pejabaran APBD TA 2020; 2) Perbup 51 Thn 2020_(Perubahan I Penjabaran APBD TA 2020) 3) Perbup 52 Thn 2020_(Perubahan II Penjabaran APBD TA 2020)	SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2020 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	21 September 2020	Tidak Punya Daya Guna	a) Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Pasal 12). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perbup 40 Thn 2020 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2020 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air	14 April 2020	Berlaku	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 mengamanatkan pada Pembentukan Peraturan Bupati dalam 8	Melakukan penyesuaian regulasi PERKADA yang telah ada sebelumnya berdasarkan PERDA ini	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	PERBUP No. 29 Thn 2020 ttg Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Danum Taka.	SELESAI

Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka		muatan Pasal yakni Pasal 4, Pasal 13 ayat (3), Pasal 27 Ayat (6), Pasal 42 ayat (4), Pasal 54 ayat (6), Pasal 58 ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (2).	dan Peraturan Menteri terkait.	2) PERBUP No. 39 Thn 2020 ttg Penghasilan KPM, Direksi, Dewan Pengawas Dan Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka. 3) PERBUP No. 20 Thn 2021 ttg Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023. 4) PERBUP No. 35 Thn 2021 ttg Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka. 5) PERBUP No. 40 Thn 2021 ttg Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Untuk Membangun Kerjasama Pengelolaan Jaringan Gas Dengan Badan Usaha Pengelolaan Jaringan Gas. 6) PERBUP No. 45 Thn 2022 ttg Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka. (PERBUP ini mencabut PERBUP PERBUP No. 29 Thn 2020). 7) PERBUP No. 27 Thn 2024 ttg Kedudukan,	
---	--	--	--------------------------------	---	--

							Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka.	
7	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka	30 Januari 2020	Berlaku	Perlu dilakukan perkuatan Regulasi Pelaksanaan (Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang seyogyanya disempurnakan dalam rangka memayungi operasional dan kinerja perusahaan.	Menyusun secara komprehensip regulasi turunan dalam rangka pelaksaaan tugas dan wewenang Perumda Benuo Taka	Bagian Perekonominan Sekretariat Daerah	1) PERBUP No. 38 Thn 2021 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah. 2) PERBUP No. 28 Thn 2022 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah. 3) PERBUP No. 22 Thn 2024 ttg Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Untuk Penyediaan Infrastruktur Dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara.	SELESAI (Catatan: Mengavaluasi Regulasi Secara Komprehensip yang dibutuhkan dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi kewenangan Permerintah Daerah dengan Penetapan oleh Kepala Daerah)
8	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	21 Januari 2020	Berlaku	a) Penetapan PERDA ini merupakan bagian dari evaluasi Perangkat Daerah evaluasi kinerja Organisasi PERANGKAT DAERAH sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan yang menjadi	a) Pemerintah Daerah tetap melakukan evaluasi terhadap Organisasi PERANGKAT DAERAH secara berkala untuk memaksimalkan kinerja agar pelaksanaan	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	1) PERBUP No. 10 Thn 2020 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2) PERBUP No. 11 Thn 2020 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,	SELESAI

			<p>kewenangan dalam Pemerintah Kabupaten;.</p> <p>b) Agar evaluasi kinerja Organisasi PERANGKAT DAERAH sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan tugas dan tanggungjawab menjadi berada di Bagian ORTALA Sekretariat Daerah</p>	<p>urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>b) Melakukan penyesuaian penjabaran PERDA melalui penyempurnaan regulasi turunannya.</p>		<p>Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 3) PERBUP No. 23 Thn 2021 ttg Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku. 4) PERBUP No. 7 Thn 2023 ttg Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Permberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. 5) PERBUP No. 3 Thn 2024 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Tahun 2021								
1	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2021 Tentang Pengelolaan Sampah	21 Juni 2021	Berlaku	Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelaksanaan) sesuai Pasal 10 ayat (2), Pasal 19, Pasal 23 ayat (8), Pasal 24 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (4), Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 56;	Menyusun Perbup yang mengatur Pedoman/Teknis Pelaksanaan dari Peraturan Daerah.	Dinas Lingkungan Hidup	PERBUP No. 47 Thn 2024 ttg Pengumpulan Sampah.	a) SELESAI (Khusus materi materi PERDA pada Pasal 24 ayat (5) terkait Pengumpulan Sampah); b) BELUM PROSES (untuk 19 Materi Pasal yang mengamanatkan pengaturan dalam PERBUP)
2	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak	22 Juni 2021	Berlaku	Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelaksanaan) sesuai Pasal 32 ayat (2)	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Telah diajukan Judul RAPERBUP ttg Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam PROPEMPERBUP Thn 2025.	BELUM PROSES / DOKUMEN BELUM LENGKAP
3	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2021 Tentang Pengembangan Ekowisata	22 Juni 2021	Berlaku	Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelaksanaan) sesuai Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (5)	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Inisiatif DPRD)	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum.	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
4	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	22 Juni 2021	Berlaku	1) Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelaksanaan	a) Menetapkan Perbup sebagai Pedoman teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum. b) Pemerintah Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Inisiatif DPRD)	1) Perbup No. 12 Thn 2023_Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 2. Dalam DPA sudah teranggarkan Anggaran Bantuan	SELESAI

			<p>) sesuai Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3);</p> <p>2) Mengatur Kewajiban Pemerintah Daerah meng angarkan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD.</p>	<p>menganggarkan Anggaran Bantuan Hukum setiap Tahun dalam APBD.</p> <p>c) Menuangkan Standar Bantuan Hukum dalam Perbup yang mengatur Standar Satuan Harga Daerah.</p>		Hukum. 3) Standar Satuan Harga Daerah sudah memuat Standar Bantuan Hukum.	
--	--	--	--	---	--	---	--

Tahun 2022								
1	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024	21 September 2022	Tidak Punya Daya Guna	Perlu menetapkan: Perbup Tata Cara Evaluasi dan Pematauan RPIK/Pedoman Pelaksanaan (Pasal 9)	Menetapkan: Perbup Tata Cara Evaluasi dan Pematauan RPIK/Pedoman Pelaksanaan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
2	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022	18 Oktober 2022	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 10).	Menetapkan Pejabaran Perubahan APBD TA 2022.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perbup 32 Thn 2022 ttg Pejabaran Perubahan APBD TA 2022	SELESAI

				b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.				
3	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	21 September 2022	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 11).  b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Menetapkan Perbup ttg Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perbup 2 Thn 2022 ttg Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Yatim Anak Piatu Dan Anak Yatim Piatu	20 Juli 2022	Berlaku	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengordinir Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Yatim Anak Piatu Dan Anak Yatim Piatu	Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Sosial (Inisiatif DPRD)	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
5	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2022 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah	20 Juli 2022	Berlaku	a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 28 ayat (3), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (2), Pasal 24 Ayat	Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang akan menggantikan PERBUP No. 19 Thn	Satuan Polisi Pamong Praja	Telah diajukan Judul RAPERBUP ttg Rencana Pembentukan Sekretariat Penyidik Pega.wai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten	BELUM PROSES / DOKUMEN BELUM LENGKAP

				<p>(6), Pasal 25 Ayat (6), Pasal 28 Ayat (3), Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan.</p> <p>b) Sebelum Perda ini ditetapkan telah diatur PERBUP No. 19 Thn 2016 ttg Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	2016 ttg Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.		Penajam Paser Utara dalam PROPEMPERBUP Thn 2025.	
6	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2022 Tentang Sistem Perlindungan Anak	20 Juli 2022	Berlaku	<p>a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 Ayat (9), Pasal 7 Ayat (5), Pasal 8 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (6), Pasal 12 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan.</p> <p>b) PERDA ini menggantikan PERDA PERDA No. 5 Thn 2014 ttg Perlindungan Perempuan Dan Anak yang mengatur materi muatan tekait Anak.</p>	Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
7	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2022 Tentang	20 Juli 2022	Berlaku	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022	Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis	Dinas Kebudayaan dan	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian	BELUM PROSES/ TIDAK

	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2027			Pasal 18 ayat (4) Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pemberian Insentif dan disinsentif Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan	Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pemberian Insentif dan disinsentif Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan	Pariwisata	Hukum	ADA PENGAJUAN
8	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	20 Juli 2022	Berlaku	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 22 ayat (3), Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pengaturan Dokumen Perencanaan Limbah B3	Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pengaturan Dokumen Perencanaan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup (Inisiatif DPRD)	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
9	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2022 Tentang Paguyuban Suku Dan Budaya	20 Juli 2022	Berlaku	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4), Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya Pusa Paguyuban dan Pembinaan Paguyuban Suku dan Budaya	Perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya Pusa Paguyuban dan Pembinaan Paguyuban Suku dan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Inisiatif DPRD)	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
10	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	20 Juli 2022	Berlaku	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (2) Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan	Perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Perbup 14 Thn 2023 ttg Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 2	25 Januari	Tidak Punya	a) Berdasarkan Peraturan	-	Badan Keuangan	PERBUP No. 3 Thn 2022	SELESAI

	Thn 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022	2022	Daya Guna	<p>Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Bupati Menetapkan Perkada Penjabaran APBD.</p> <p>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</p>		dan Aset Daerah	ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.	
12	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	25 Januari 2022	Tidak Punya Daya Guna	<p>a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Bupati Menetapkan Perkada Penjabaran Perubahan APBD.</p> <p>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</p>	-	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perbup 29 Thn 2022 ttg Pejabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2021.	SELESAI
<b>Tahun 2023</b>								
1	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024	28 Desember 2023	Tidak Punya Daya Guna	<p>a) Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18).</p> <p>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</p>	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PERBUP No. 36 Thn 2023 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	18 Oktober 2023	Tidak Punya Daya Guna	<p>a) Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal</p>	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2023.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PERBUP No. 28 Thn 2023 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	SELESAI

				10). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.				
3	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	21 Agustus 2023	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 11).  b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Menetapkan PERBUP tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.	Badan Keuangan dan Aset Daerah ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.	PERBUP No. 20 Thn 2023	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2023 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah	18 April 2023	Berlaku	a) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk dapat	Menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam PERDA yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 47 dan materi Pasal lainnya sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Inisiatif DPRD)	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN

				<p>diakses oleh setiap orang diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 20).</p> <p>b) Standar layanan informasi publik yang antara lain memuat Tata cara memperoleh Informasi Publik ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 22).</p> <p>c) Tata Cara pengajuan keberatan (Sengketa Informasi) secara tertulis kepada atasan PPID diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 47).</p>				
5	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas	18 April 2023	Berlaku	<p>PERDA mengamanatkan untuk menetapkan beberapa PERBUP antara lain:</p> <p>a) PERBUP yang Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat (4).</p> <p>b) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi penyiapan data terkait Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 5).</p> <p>c) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kelas Terpadu atau Inklusi dan</p>	<p>Menetapkan 2 PERBUP, yakni:</p> <p>1 PERBUP yang mengatur khusus Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas.</p> <p>2 PERBUP gabungan dari seluruh amanat Pasal dan Pasal lainnya perlu penjelasan teknis yang</p>	Dinas Sosial (Inisiatif DPRD)	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN

			<p>SLB diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 20).</p> <p>d) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan Pelayanan atau Pelayanan Khusus diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 27).</p> <p>e) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/ atau masyarakat kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/ atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 28).</p> <p>f) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 42).</p> <p>g) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>	<p>tertuang dalam PERDA sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas.</p> <p>Pada angka 2) diatas tetap mengatur tata cara dan mekanisme penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas, sementara khusus angka 1) yang ditetapkan hanya RENCANA AKSI DAERAH.</p>		
--	--	--	---	--	--	--

- pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 45).
- h) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 52).
- i) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara penzinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, harus membebaskan biaya Habilitasi dan Rehabilitasi. diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 63).
- j) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal

- 67).
- k) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 68 ayat 7).
  - l) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dalam mewujudkan pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 74).
  - m) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 77 ayat 2).
  - n) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 81).
  - o) PERBUP ttg Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

				koordinasi dan pembinaan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 85 ayat 3 dan ayat 4).				
6	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2023 Tentang Dukungan Dan Fasilitasi Bagi Pondok Pesantren	18 April 2023	Berlaku	<p>PERDA mengamanatkan untuk menetapkan beberapa PERBUP antara lain mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 11).</li> <li>b) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan fasilitasi bagi Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 15).</li> <li>c) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan Dukungan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah bagi Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 16).</li> <li>d) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi</li> </ul>	<p>Menetapkan PERBUP yang mengatur Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam PERDA yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 serta materi Pasal lainnya sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan Dukungan Dan Fasilitasi Bagi Pondok Pesantren.</p>	<p>Bagian Kesejahteraan Rakayat Sekretariat Daerah (Inisiatif DPRD)</p>	<p>PERBUP No. 32 Thn 2024 ttg Pedoman Pelaksanaan Dukungan Dan Fasilitasi Bagi Pondok Pesantren.</p>	SELESAI

				Pemerintah Daerah pada fungsi dakwah Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 17). e) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18). f) Ketentuan mengenai tata cara monitoring dan evaluasi terhadap dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan bagi Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 21).				
7	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2023 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	18 April 2023	Berlaku	Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehingga pedoman teknis ditetapkan Penetapan Perda ini, harus segera disesuaikan.	Melakukan penyesuaian Pedoman Teknis BPD yang menggantikan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Badan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Inisiatif DPRD)	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN

			<p>Adapun amanat dalam PERDA yakni:</p> <p>PERDA mengamanatkan untuk menetapkan beberapa PERBUP antara lain mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 3).</li><li>b) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 9).</li><li>c) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian cuti diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 11).</li><li>d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan calon anggota BPD diatur dengan Peraturan bupati (Pasal 12).</li><li>e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pengisian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 13).</li><li>f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 16).</li></ul>	Permusyawaratan Desa			
--	--	--	---	----------------------	--	--	--

- |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>g) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pemberhentian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 18).</p> <p>h) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian BPD antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 19).</p> <p>i) ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 27).</p> <p>j) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional kegiatan BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 28).</p> <p>k) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya bagi Anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 29).</p> <p>l) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pembayaran dan pembebanan iuran jaminan sosial mengacu pada Peraturan Bupati (Pasal 30).</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

				m) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 35).				
8	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	11 April 2023	Berlaku	<p>Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah mengamanatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasal 15 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan PUG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> <li>b) Pasal 16 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> <li>c) Pasal 20 ayat (3) Pedoman mengenai kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</li> <li>d) Pasal 20 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif (kepada PD yang tidak melaksanakan</li> </ul>	<p>Perlu segera menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis PUG, yang menggantikan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>Telah diajukan Judul RAPERBUP ttg Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah dalam PROPEMPERBUP Thn 2025.</p>	BELUM PROSES / DOKUMEN BELUM LENGKAP

				PUG) diatur dalam Peraturan Bupati.				
9	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2023 Tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	11 April 2023	Berlaku	<p>a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, Pasal 5 dan Pasal 6, diatur Pembentukan dan Tata Cara Pelayanan UPTD PPA dengan Peraturan Bupati, dan Pasal 15 ayat (3) tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>b) b) PERDA ini menggantikan PERDA PERDA No. 5 Thn 2014 ttg Perlindungan Perempuan Dan Anak yang mengatur materi muatan tekait Perlindungan Perempuan.</p>	<p>a) Menetapkan PERBUP mengenai Pembentukan dan Tata Cara Pelayanan UPTD PPA.</p> <p>b) Materi PERBUP dapat juga memuat materi detail tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan.</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara</p>	<p>SELESAI (Catatan: karena tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu merupakan amanat langsung dari PERDA, seyogyanya dapat dilakukan evaluasi apakah SPM harus selalu mengacu pada Peraturan Menteri masih relevan).</p>

Tahun 2024								
1	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	13 Agustus 2024	Tidak Punya Daya Guna	Bupati menetapkan peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 18).	Menetapkan PERBUP tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PERBUP No. 29 Thn 2024 ttg Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2024.	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 8	9 Agustus	Tidak Punya	Bupati Penajam Paser Utara	Menetapkan PERBUP	Badan Keuangan	PERBUP No. 28 Thn 2024	SELESAI

	Thn 2024 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	2024	Daya Guna	menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 11)	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023	dan Aset Daerah	ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. PPU TA 2023	
3	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2024 Tentang Pedoman Zona Nilai Tanah	30 Januari 2024	Berlaku	<p>a) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata Tanah, inventarisasi dan identifikasi Nilai Tanah, dan klasifikasi Zona Nilai Tanah diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 12).</p> <p>b) Mekanisme penanganan pengaduan dan keberatan terhadap pemanfaatan peta zona nilai tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 16).</p>	Menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Penetapan Zona Nilai Tanah	DPRD	Pembentukan PERBUP tentang TATA CARA PEMBENTUKAN/ PENYEMPURNAAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDEKS RATA-RATA saat ini berada pada tahap FASILITASI GUBERNUR	PROSES (Fasilitasi Gubernur)
4	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2024 Tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	30 Januari 2024	Berlaku	<p>Menetapkan Beberapa PERBUP antara lain:</p> <p>a) PERBUP ttg Pembentukan unit operasional dan unit pelaksana di tingkat kecamatan dan desa diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 9).</p> <p>b) PERBUP ttg Perencanaan</p>	<p>Menetapkan PERBUP yang memuat minimal 18 Materi Pasal yang dapat digabung dalam beberapa PERBUP yang sesuai ruang lingkup.</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>PERBUP No. 7 Thn 2024 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Korban Bencana.</p>	<p>1) SELESAI (hanya sebagian kecil materi Pasal 82, yang diatur mengenai pengelolaan dana dari APBD). 2) BELUM PROSES/ TIDAK</p>

			<p>Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 14).</p> <p>c) PERBUP ttg Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 21 ayat 4).</p> <p>d) PERBUP ttg pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 23 ayat 4).</p> <p>e) PERBUP ttg Kemudahan akses saat saat Status Keadaan Darurat Bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 33).</p> <p>f) PERBUP ttg Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 38 ayat 5).</p> <p>g) PERBUP ttg sistem komando pengendalian lapangan status keadaan darurat diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 43 ayat 5).</p> <p>h) PERBUP ttg pedoman penyusunan rencana operasi Tanggap Darurat Bencana diatur dengan Peraturan Bupati. (Pasal</p>				ADA PENGAJUAN (17 Materi Pasal dan teknis lainnya)
--	--	--	--	--	--	--	--

- 45 ayat 4).
- i) PERBUP ttg Koordinasi pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh masyarakat, Lembaga Internasional, Lembaga Asing Non Pemerintah, dan lembaga usaha diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 47 ayat 3).
  - j) PERBUP ttg Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 64 ayat 2).
  - k) PERBUP ttg partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat pada rencana kegiatan Rekonstruksi tahap pasca bencana diatur dengan Peraturan Bupati. (Pasal 66 ayat 2).
  - l) PERBUP ttg Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya pada kegiatan rekonstruksi pasca bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 67 ayat 2).
  - m) PERBUP ttg penyelenggaraan Kawasan Rawan Bencana

				diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 69 ayat 4). n) PERBUP ttg partisipasi masyarakat dalam penyediaan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 79). o) PERBUP ttg pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 82). p) PERBUP ttg pengelolaan barang penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 86). q) PERBUP ttg mekanisme peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 88 ayat 3). r) PERBUP ttg tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati (Pasal 95 ayat 3).			
5	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2024 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan,	30 Januari 2024	Berlaku	Menetapkan PERBUP ttg Tata cara pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan	a) Menetapkan PERBUP ttg Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi	Dinas Perikanan (Inisiatif DPRD)  TIDAK ADA PENGAJUAN  BELUM SELESAI	

	Pembudi Daya Ikan, Pengolahan Dan Pemasaran Serta Petambak Garam			perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam diatur dalam peraturan bupati. (Pasal 27 ayat 6)	Daya Ikan, Pengolahan Dan Pemasaran Serta Petambak Garam. b) Materi Pasal PERBUP dapat mengatur Teknis Pelaksanaan secara keseluruhan dari PERDA. c) Materi PERBUP dapat saling terkait dengan PERDA No. 4 Thn 2024 ttg Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pengolahan Dan Pemasaran Serta Petambak Garam.			
6	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2024 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	30 Januari 2024	Berlaku	Menetapkan Beberapa PERBUP antara lain: a) PERBUP ttg pembentukan perpustakaan, Taman Bacaan dan/atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 14 ayat 3). b) PERBUP ttg Tata tertib perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 21 ayat 7). c) PERBUP ttg tata cara pelayanan Perpustakaan dengan Peraturan Bupati (Pasal 35 ayat 7). d) PERBUP ttg Ketentuan	1) Menetapkan PERBUP yang mengatur paling sedikit ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 14 ayat 3). 2) PERBUP tersebut dapat digabung dalam 1 PERBUP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Telah Diajukan 2 RAPERBUP mengatur PEDOMAN TEKNIS dan BULAN LITERASI pada Tahun 2024, namun sampai saat ini tidak pernah dilengkapi persyaratan sehingga tidak dapat dilanjutkan.	BELUM PROSES /TIDAK ADA PENGAJUAN BARU

				Hak Tenaga perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal38 ayat 2). e) PERBUP ttg bentuk kegiatan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 41 ayat 3). f) PERBUP ttg tata cara pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan gemar membaca serta pelestarian Naskah Kuno diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 45 ayat 3). g) PERBUP ttg Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 47 ayat 3).	yang mengatur Pedoman Teknis Penyelenggaraan Perpustakaan.			
7	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	26 Januari 2024	Berlaku	a) Ketentuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib untuk dilakukan penyesuaian; b) Pengatur hasil penataan perangkat daerah berdasarkan hasil skoring	Menyesuaikan PERBUP yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan adanya	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	a) Peraturan Bupati No. 8 Thn 2024 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah. b) PERBUP diatas mencabut	SELESAI

				ulang terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terjadi perubahan tipologi.	perubahan kedua PERDA perangkat daerah dimaksud.		sekitar 39 PERBUP Tupoksi dari PERDA awal/Perubahan Kesatu.	
8	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	04 Januari 2024	Berlaku	Dalam PERDA No. 1 Thn 2024, memuat ketentuan pengaturan teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 21 amanat Pasal yang dapat dikelompokan dalam 2 klasifikasi penggolongan pedoman teknis yakni Pajak dan Retribusi.	Menetapkan 2 PERBUP yang menjadi pedoman teknis dari seluruh muatan materi PERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni: a) Tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati. dan b) Tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.	Badan Pendapatan Daerah	1) Peraturan Bupati No. 1 Thn 2024 ttg Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa. 2) Peraturan Bupati No. 45 Thn 2024 ttg Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) Peraturan Bupati No. 6 Thn 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah. 4) Peraturan Bupati No. 45 Thn 2024 ttg Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5) Peraturan Bupati No. 7 Thn 2025 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah.	SELESAI Catatan: agar pedoman teknis ini (PERBUP No. 6 Thn 2025 dan PERBUP 7 Thn 2025) tetap dievaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan di lapangan, dan dengan banyaknya muatan meteri jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk yang ada hubungan dengan pungutan Pajak oleh Pemerintah Provinsi)

9	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2024 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Daerah	30 Januari 2024	Berlaku	<p>Menetapkan Beberapa PERBUP antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PERBUP ttg Rencana Umum Penanaman Modal (Pasal 6).</li> <li>b) PERBUP ttg pendeklegasian kewenangan Bupati kepada kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan (Pasal 10 ayat 3 dan ayat 6).</li> <li>c) PERBUP ttg Manajemen penyelenggaraan Perizinan termasuk didalamnya memuat petunjuk teknis penyuluhan kepada masyarakat (Pasal 21, Pasal 30 ayat 4, Pasal 31 ayat 4).</li> <li>d) PERBUP ttg Petunjuk Teknis pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman Modal (Pasal 34).</li> <li>e) PERBUP ttg Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati</li> </ul>	<p>Menetapkan sekitar 5 PERBUP sebagaimana dimaksud dari hasil penelusuran Perda No. 6 Thn 2024</p>	DPRD	<p>a) PERBUP No. 51 Thn 2024 ttg Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab PPU. b) PERBUP No. 52 Thn 2024 ttg Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab PPU. c) PERBUP No. 53 Thn 2024 ttg Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.</p>	<p>1) SELESAI (2 Materi Pasal 10 dan Pasal 34). 2) BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN (3 Materi Raperup lainnya yakni: amanat Pasal 6, Pasal 21, Pasal 30 ayat 4, Pasal 31 ayat 4)</p>
---	---	-----------------	---------	---	---	------	---	---

				(Pasal 39).				
10	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	30 Desember 2024	Berlaku	Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18)	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Bupati No. 57 Thn 2024 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	SELESAI
<b>Tahun 2022</b>								
1	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023	22 Desember 2022	Tidak Punya Daya Guna	a) Perlu menetapkan PERBUP Penjabaran APBD TA.2023 (Pasal 18). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Menetapkan Perbup ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	PERBUP No. 3 Thn 2022 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.	SELESAI
<b>Tahun 2025</b>								
1	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik	08 April 2025	Berlaku	Dalam PERDA No. 1 Thn 2025, memuat ketentuan pengaturan teknis Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik dalam 5 amanat Pasal sebagai berikut:  a) Pasal 4 : Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek dan objek sasaran Subjek Sasaran pengembangan pertanian Organik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.  b) Pasal 13 ayat (3) : Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja Unit Pengelola Sistem Jaminan Partisipatif diatur dalam	Agar segera menetapkan PERBUP sebagai petunjuk Pelaksanaan PERDA sesuai ketentuan yang didelegasikan dan dapat disatukan dalam 1 PERBUP atau beberapa PERBUP sesuai ruang lingkup yang diatur.	Dinas Pertanian (Inisiatif DPRD)	Ada Pengajuan dalam PROPEMPERKADA Tahun 2026, Judul "Pengelolaan Pertanian Organik Berbasis Kawasan"	BELUM SELESAI (Pembentukan/Pembahasan Raperbup akan dilaksanakan pada Tahun 2026)

				Peraturan Bupati. c) Pasal 14 : Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif kepada Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang melaksanakan pertanian Organik diatur dalam Peraturan Bupati. d) Pasal 15 : Ketentuan mengenai tata cara pemberian disinsentif kepada Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah mendapatkan insentif namun tidak melaksanakan ketentuan pertanian Organik diatur dalam Peraturan Bupati. e) Pasal 17 ayat (2) : Dalam rangka penyelenggaraan pertanian Organik di Daerah, Pemerintah Daerah melaui Dinas dapat membentuk Forum Pertanian Organik Daerah.				
2	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2025 Tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman	08 April 2025	Berlaku	Dalam PERDA No. 2 Thn 2025, memuat ketentuan pengaturan teknis Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman dalam 6 amanat Pasal sebagai berikut: a) Pasal 7 : Ketentuan	Agar segera menetapkan PERBUP sebagai petunjuk Pelaksanaan PERDA sesuai ketentuan yang didelegasikan dan dapat disatukan dalam 1 PERBUP atau beberapa PERBUP sesuai ruang lingkup yang diatur.	Dinas Lingkungan Hidup (inisiatif DPRD)	BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

- mengenai tata cara inventarisasi (Inventarisasi Pohon dan inventarisasi kondisi lingkungan) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- b) Pasal 12 ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - c) Pasal 13 : Ketentuan mengenai penetapan pembagian RTH publik, Jalur Hijau dan Taman diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
  - d) Pasal 30 ayat (4) : Ketentuan mengenai tata cara peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pohon diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
  - e) Pasal 36 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Penebangan Pohon diatur dalam Peraturan Bupati.
  - f) Pasal 44 : Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan penjatuhan sanksi administratif dan

				tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.				
3	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan	02 Mei 2025	Berlaku	Memperhatikan ketentuan PERDA ini pada Pasal 5: Pendidikan Kepramukaan dapat dilaksanakan sebagai kegiatan Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah, Pasal 10: Dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan merujuk kepada: a. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pasal 19 ayat (2): Tanggung Jawab pengelolaan Pendidikan Kepramukaan pada Perangkat Daerah berada pada kepala Perangkat Daerah, maka PERDA ini, seharusnya memiliki petunjuk pelaksanaan PERDA yang menjadi pedoman teknis bagi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.	Agar dibentuk PERBUP sebagai petunjuk pelaksanaan PERDA.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

4	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	02 Mei 2025	Berlaku	Dengan adanya perubahan nomenklatur nama Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 3 huruf e angka 1 PERDA ini, maka Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tersebut harus dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur khusus Perangkat Daerah yang terkait.	Agar membentuk PERBUP tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 Tentangkedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	BELUM DIAJUKAN	BELUM SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2025 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	02 Mei 2025	Berlaku	<p>PERDA ini mengatur sekitar 17 Pasal sebagai perintah untuk mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasal 49 Ayat (5) : Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan PERKADA.</li> <li>b) Pasal 56 Ayat (3) : Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah</li> </ul>	<p>a) Menetapkan PERKADA sebagai amanat PERDA No. 5 Thn 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>b) Materi PERKADA sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dituangkan didalam PERKADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan</p>	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<p>Ada Pengajuan Raperbup dalam PROPEMPERBUP Tahun 2026, yakni: a) Raperbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; b) Raperbup tentang Penyelesaian Utang Daerah; c) Raperbup tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Pencairan Dana;.</p>	BELUM SELESAI

			<p>diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c) Pasal 59 Ayat (6) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d) Pasal 62 Ayat (3) :Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam PERKADA.</p> <p>e) Pasal 79 Ayat (4) : Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f) Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) : Berdasarkan persetujuan bersama (Catatan: Terhadap APBD), Bupati menyiapkan rancangan PERKADA tentang Penjabaran APBD dan</p> <p>Pasal 110 Ayat (1) : Penetapan PERKADA tentang Penjabaran</p>	<p>Daerah sesuai jenis materinya, atau berdiri sendiri sesuai dengan ruang lingkup yang akan di atur dan/atau kondisi yang menyebabkan PERKADA harud diatur terpisah.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

- APBD.
- g) Pasal 104 Ayat (1): Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan PERKADA tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. (Catatan: kondisi situasional).
  - h) Pasal 118 : Terhadap kewajiban pemindahbukuan yang secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam PERKADA dan ketentuan sesuai rencana pengeluaran sebagai operasi rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah dari Rekening Pengeluaran ditetapkan dalam PERKADA.
  - i) Pasal 127 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata

				cara pelaksanaan penyusunan Anggaran Kas dan SPD diatur dalam PERKADA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.				
			j)	Pasal 128 ayat (2) : Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan (Catatan: pada ayat 1 diatur paling lambat dalam waktu 1 hari) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam PERKADA.				
			k)	Pasal 135 ayat (2) : Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dan PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan PERKADA.				
			l)	Pasal 144 : Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (Catatan : Bendahara Pengeluaran/Bendahara				

			<p>Pengeluaran pembantu pada SKPD) dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam PERKADA.</p> <p>m) Pasal 155 Ayat (2) : Pergeseran anggaran antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan PERKADA tentang Penjabaran APBD.</p> <p>n) Pasal 155 Ayat (7) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>o) Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) : Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam PERKADA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>			
--	--	--	---	--	--	--

- undangan.
- p) Pasal 182 Ayat (4) : Atas dasar persetujuan bersama (Catatan: terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati dan DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan PERKADA tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 184 mengatur ketentuan Penetapannya.
- q) Pasal 191 ayat (1) dan Ayat (2) : Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam PERKADA yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

PERDA No. 5 Thn 2025

				tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah amanat dari Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, amanat lain dalam PERMENDAGRI tersebut yakni Penetapan 3 PERKADA meliputi:  1) Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah; 3) Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan 4) Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja.				
6	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045	02 Mei 2025	Berlaku	Pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) PERDA ini, memuat perintah untuk menetapkan RPJMD (Peraturan Daerah) dan PERBUP sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Agar menetapkan 4 (Empat) Peraturan Daerah atau RPJM Daerah dengan 4 Tahap RPJM Daerah I Tahun 2025_2029; b. RPJM Daerah II Tahun 2030_2034; c. RPJM Daerah III Tahun	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	a. Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah I (RPJMD Thn 2025-2045).  b. RPJM Daerah II Tahun 2026;  c. RPJM Daerah III Tahun 2027	SELESAI 1. (Catatan; RJPMD I 2025-2029 dan RKP Daerah Tahun 2026); (Tahun 2025 telah Selesai). (Tahun 2026 telah Selesai). (Tahun 2027)

				Daerah.	2035_2039; dan d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044. Ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati yang mengatur RKPD setiap tahun.			belum waktunya). (Tahun 2028 belum waktunya). (Tahun 2029 belum waktunya). 2. (Catatan; RJPMD II (belum waktunya); 3. (Catatan; RJPMD III (belum waktunya); 4. (Catatan; RJPMD IV (belum waktunya).
7	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	20 Agustus 2025	Berlaku	Pasal 2 ayat (2) PERDA ini menyatakan bahwa Penyusunan RKPD berpedoman pada Perda ini.	Agar setiap tahun, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	a) PEMDA menetapkan Peraturan Bupati No. 26 Thn 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.	a. RKPD Tahun 2025 (SELESAI)/ diselesaikan pada tahun 2024; b. RKPD Tahun 2026 (SELESAI). c. RKPD Tahun 2027 (belum waktunya). d. RKPD Tahun 2028 (belum waktunya). e. RKPD Tahun 2029 (belum waktunya).
8	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	11 September 2025	Berlaku	a) Perda ini merupakan atribusi dari Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 194 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah	Agar Perangkat Daerah (BKAD) menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Telah ditetapkan Peraturan Bupati No. 37 Thn 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran	SELESAI

			<p>selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun, mengajukan dan menetapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>b) Pasal 11 Perda ini memerintahkan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban</p>		2024	
--	--	--	--	--	------	--

				pelaksanaan APBD.				
9	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	24 Oktober 2025	Berlaku	<p>a) Perda ini merupakan atribusi dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, 177 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun, mengajukan dan menetapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.</p> <p>b) Perda ini memerintahkan penetapan peraturan Bupati Penajam Paser</p>	Agar Perangkat Daerah BKAD menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Telah ditetapkan Peraturan Bupati No. 41 Thn 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	SELESAI

				Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.				
10	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	31 Desember 2025	Berlaku			Badan Keuangan dan Aset Daerah		